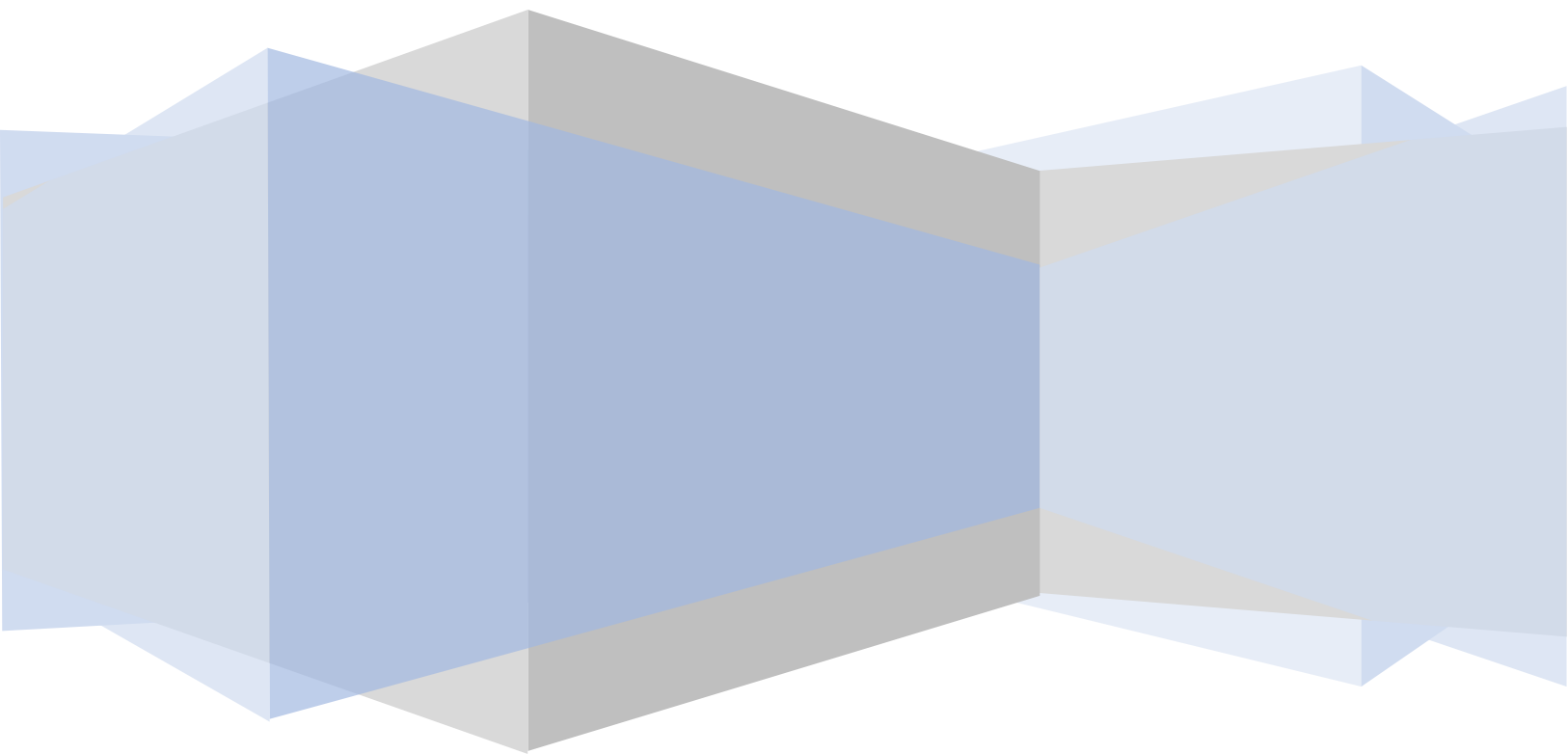


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LKIP BPKAD KOTA CIMAHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini.

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Aamin.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,** 



HARJONO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2013-2026 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset.

Selama tahun anggaran 2023, BPKAD didukung penyediaan anggaran sebesar Rp. 28.833.670.767,00, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.17.183.841.256,00, belanja modal sebesar Rp. 521.823.300,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 11.128.006.211,00 dengan pencapaian realisasi sebesar 16.151.994.763 atau 56,02% yang terdiri dari Rp.12.638.294.105,00

atau 73,55% untuk belanja operasional, Rp.506.862.900,00 untuk belanja modal atau 97,13% dan 3.006.837.758,00 atau 27,02% untuk belanja tidak terduga.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, serta pada tahun 2023 fokus utama pencapaian kinerja khususnya dalam penataan utilisasi aset daerah sudah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
2. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
3. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Beberapa hal di atas dilakukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD, legalisasi kepemilikan aset, mempercepat ketersediaan dan meningkatkan kualitas data keuangan dan aset serta pemanfaatan aset guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cimahi.

Mengacu kepada hasil nilai LKIP BPKAD tahun 2022 yang memperoleh nilai 80,80 dengan predikat A, ada beberapa perbaikan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yang didasarkan kepada LHE Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nomor : 700.02/118/Sekre dari Inspektorat Kota Cimahi. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

- Pedoman teknis perencanaan kinerja belum memasukan dasar aturan terbaru Permendagri No 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 .
- Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) namun belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Pengukuran Kinerja

Belum sepenuhnya pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.

c. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

Beberapa rekomendasi tersebut menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan tugas di BPKAD yang dilaksanakan di tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2023 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2023, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,76 %.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

N o	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	72%	71,83 %	99,76 %
Rata - Rata Capaian						99,92 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi.....	2
1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi	2
1.3.2 Isu Strategis.....	6
1.4 Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi	11
2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022.....	11
2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran	12
2.4 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Akuntabilitas Kinerja	31
3.2 Pengukuran Kinerja.....	33
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	46
3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	45
3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	50
3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	50
3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	53
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	54
3.4.1 Belanja Operasional.....	55
3.4.2 Belanja Modal	56
3.4.3 Belanja Tidak Terduga.....	56
3.5 Evaluasi Kinerja.....	56
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pelaporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 tingkat pencapaiannya sebesar 99,92%. Hal ini didukung oleh pencapaian atas dua indikator utama yang mencapai 100% yaitu (1) penyusunan APBD yang tepat waktu dan (2) prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan satu indikator utama lainnya yaitu rasio utilisasi aset mencapai 99,76 %.

Mengacu kepada hasil yang diuraikan di atas, maka pada tahun 2023 BPKAD berusaha mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja terutama pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam memenuhi target akhir rencana strategis rasio utilisasi sebesar 72% yaitu :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi aset;
3. Pengamanan dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus

menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 36 PNS dan 1 orang P3K.

Tabel 1.1

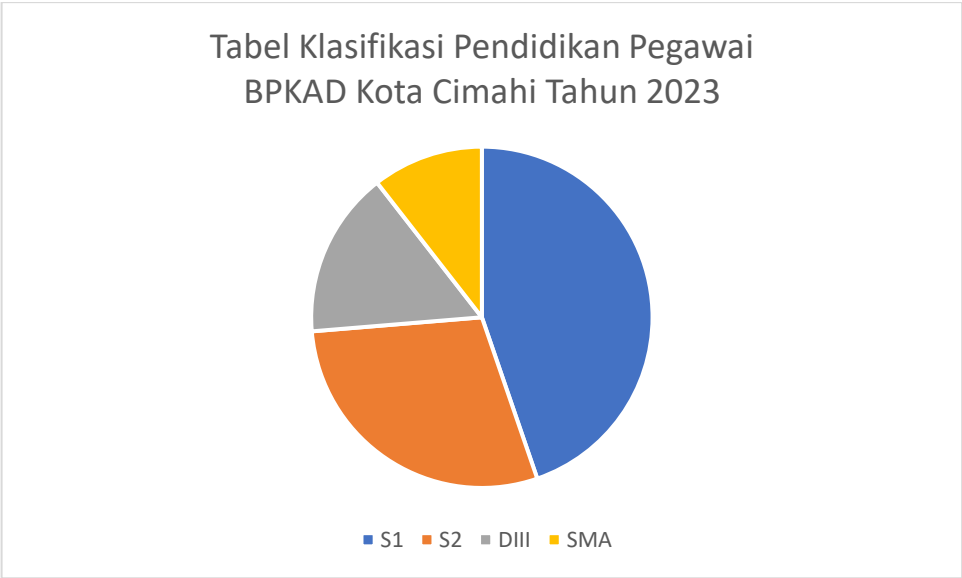
Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV / c	1 Orang
Pembina Tk I	IV / b	1 Orang
Pembina	IV / a	3 Orang
Penata Tk I	III / d	4 Orang
Penata	III / c	9 Orang
Penata Muda Tk I	III / b	8 Orang
Penata Muda	III / a	7 Orang
Pengatur Tk I	II / d	3 Orang
P3K	09	1 Orang

Pegawai BPKAD dalam mencapai kinerja yang dibutuhkan diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan.

Gambar 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

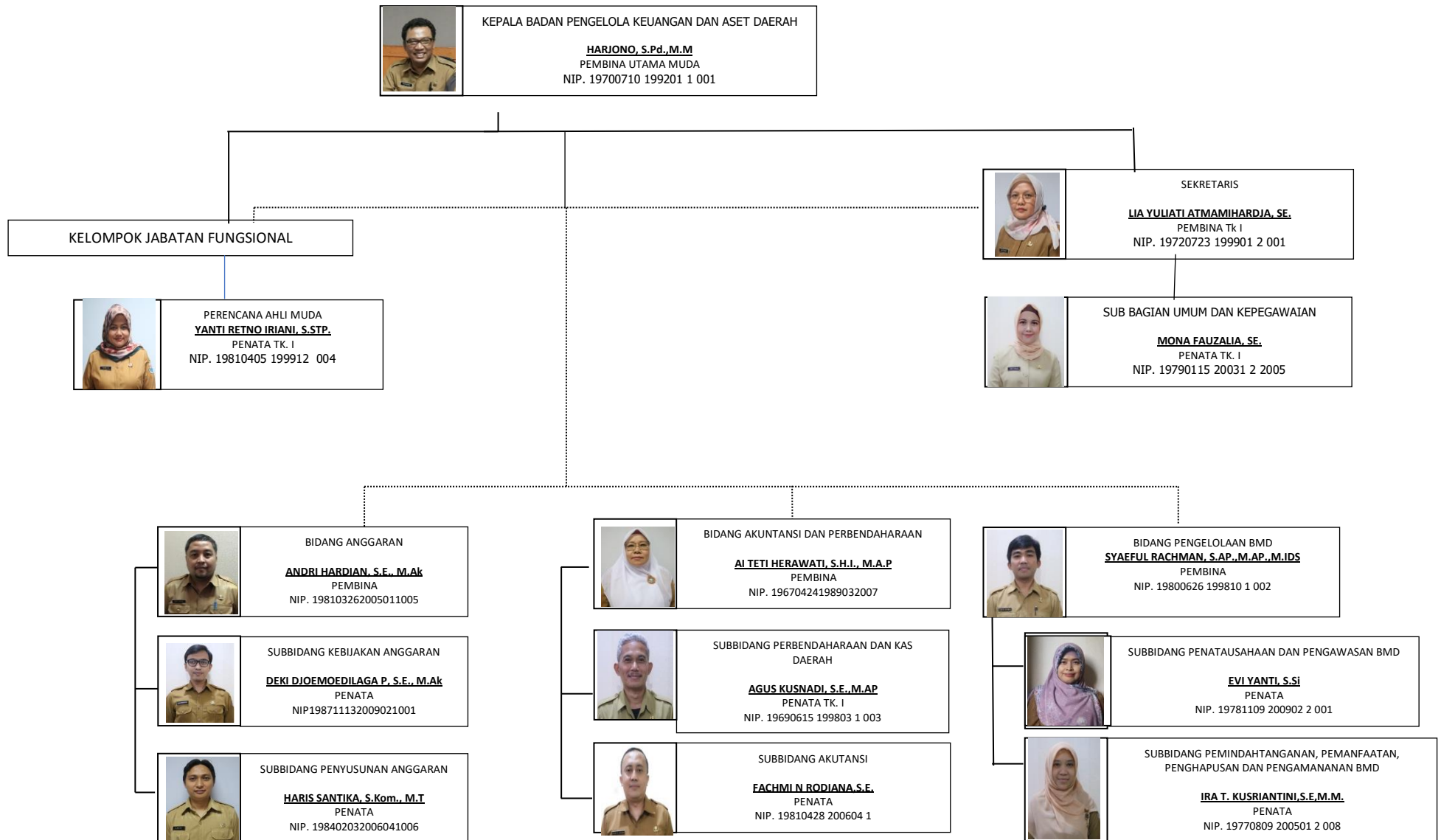
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Magister / S2	11 Orang
Sarjana / S1	18 Orang
Diploma /D3	5 Orang
SLTA / Sederajat	3 Orang

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 18 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 11 orang serta D-III sebanyak 5 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 3 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 29 orang atau 78,3 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2023. Tetapi dilihat dari jumlah pegawai masih dinilai kurang dilihat dari susunan analisis jabatan yang ada.

Selain pegawai dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan dan mesin berkondisi baik yang dimiliki.

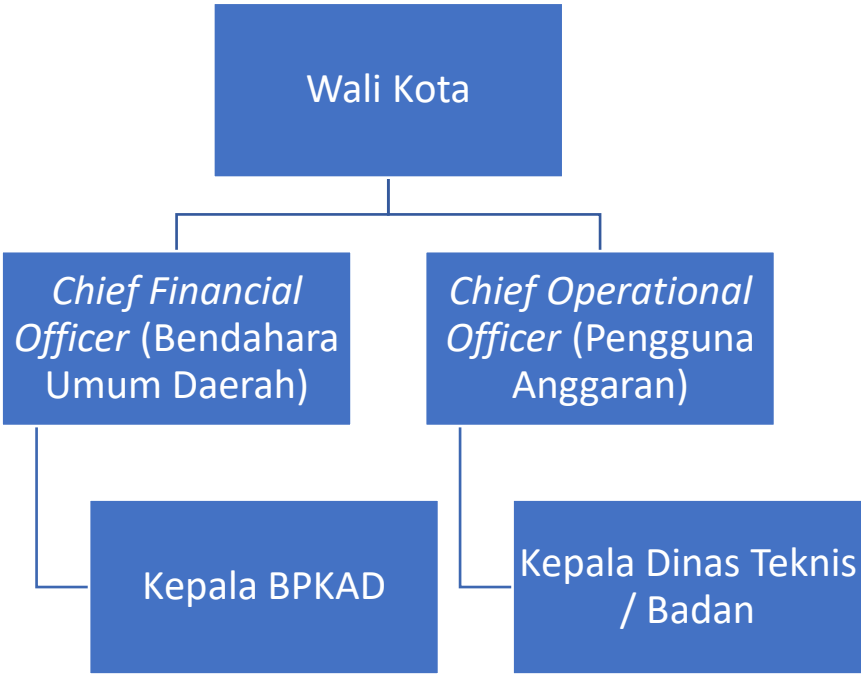
Gambar 1.2 Struktur Organisasi



1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.



Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Adapun Misi yang tercantum dalam RPJPD untuk periode 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Terkait dengan misi, urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

RPD Tahun 2023-2026 Kota Cimahi memuat 7 (Tujuh) Tujuan Kota dan 28 (Dua puluh Delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (impact).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya

Manusia;

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Dalam RPD 203-2026 Kotra Cimahi BPKAD masuk kedalam tujuan kota nomor 3 meningkatkan tata Kelola pemerintahan dengan sasaran Opini BPK.

Selain itu dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD. Isu-isu strategis BPKAD untuk tahun 2023, yaitu :

1. Penggunaan SIPD sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan);
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan terbaru;
3. Pengamanan terkait aset-aset Pemerintah Kota Cimahi;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi BMD menggunakan aplikasi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis diatas adalah :

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIPD;
2. Adanya pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD;
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sertifikasi tanah dan penyelesaian aset bermasalah;
4. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Persegi dan Grafis serta Pelaksanaan sensus barang (KIB C dan D) pada tahun 2023;
5. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset;

Kemudian dalam rangka mempertahankan Opini WTP Pemeriksaan BPK RI 10 kali berturut-turut, BPKAD memiliki tantangan berupa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SIPD Aklap yang masih dalam proses pengembangan. Upaya yang dilakukan dengan meminta pendampingan kepada tenaga ahli SIPD Aklap Provinsi

Jawa Barat dari sisi kebutuhan data yang dibutuhkan bersumber dari SIPD.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2023;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2023;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan BPKAD haruslah searah dan sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan dari Kota Cimahi baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJP Kota Cimahi berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menentukan visi, misi, dan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perencanaan Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2023 merupakan indikator kinerja yang mengaju kepada RPD 2023-2026 yang telah ditetapkan, sehingga pada anggaran perubahan tahun 2023 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPD yang baru.

Indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 pada Tahun 2023 terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator.

IKU		IKU	
Hasil Penetapan RPD 2023-2026		Berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD Tepat Waktu 2. Presentase Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Rasio Utilisasi Aset

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi yang tercantum pada RPD.

Visi Kota Cimahi yaitu “Cimahi Kota Cerdas”. Dengan penjelasan bahwa:

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari

- **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
- **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

BPKAD menjalankan visi Wali kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 – 2026. Pada dasarnya penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 9 program

prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.3 Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2023. Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2023 – 2026 adalah :

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Teroptimalisanya kualitas	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran

	s tata kelola keuan gan daerah	Milik Daerah							
			2. Presentase Penyusun an Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerinta han	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Akuntans i dan Perbenda haraan
			3. Rasio Utilisasi Aset	40 %	50 %	60 %	70 %	72 %	Bidang Pengelola an Barang Milik Daerah

Selain keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja dalam pencapaian target BPKAD tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa kerjasama baik internal antar bidang maupun eksternal dari perangkat daerah. Oleh karena itu crosscutting dalam pencapaian target BPKAD dapat dilihat pada :

Tabel 2.2
Crosscutting Kinerja BPKAD

No	Target Kinerja	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	
			Internal BPKAD	Eksternal
1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penyusunan KUA-PPAS menunggu RKPD ditetapkan	Sub bidang Kebijakan Anggaran dan Sub bidang	Bappelitbangda

			Penyusunan Anggaran	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penyusunan laporan keuangan tingkat kota yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan Perangkat Daerah	Sub bidang Akuntansi dan Sub bidang Perbendaharaan	Seluruh Perangkat Daerah
3	Rasio Utilisasi Aset	Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub bidang Penatausahaan dan Pengawasan, Sub bidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pengamanan BMD dan Sub bidang Akuntansi	Seluruh Perangkat Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian Laporan	100%

		Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
		Rasio Utilisasi Aset Daerah	72%

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Tabel 2.4
Renja BPKAD Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			49.594.622.00 0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			19.279.290.73 0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	100%	31.845.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	23.115.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	8.730.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran dan ASN yang mendapatkan pelayanan	100%	18.102.064.998
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	42 Orang	18.094.622.998
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.440.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	3.002.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sosialisasi yang dilaksanakan	100%	10.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	60 Orang	10.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah yang diberikan	100%	1.714.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.714.500
	Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diberikan	100%	738.195.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	159.184.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	53.772.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 paket	27.069.800

		Penggandaan yang Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	373.362.900
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	85.707.000
	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	39.150.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	332.148.502
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	332.148.502
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan	100%	20.516.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.116.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	216.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	12 kendaraan R2 dan 9 Kendaraan R4	216.500.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			28.341.37.100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.291.637.100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	88.599.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	76.963.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	232.660.200
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	292.262.400
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Aplikasi	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 dokumen	21.711.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen Perda 1 dokumen Perwal Penjabaran APBD	100.128.600
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen Perda 3 dokumen Perwal Penjabaran APBD	99.192.200
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen (SE Pedum)	142.609.500
	Jumlah laporan Fasilitasi kebijakan Regulasi Penganggaran		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 dokumen	76.176.400
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 dokumen	70.076.400

	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	69.546.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	450.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 dokumen (RKUD)	58.613.200
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240 dokumen (SPD)	32.727.800
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 dokumen	37.331.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 laporan	38.478.900

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120 BA (Rekon Penerimaan dan Pengeluaran)	35.673.300
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	86.447.600
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 orang	160.728.200
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai SAP	100%	850.000.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	- 20 dokumen (dok pendukung lap bulanan, triwulan, semesteran) - 1 dokumen (rekon) - 1 data valid (validasi transaksi pendapatan dan belanja)	34.677.800
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	- 1 laporan (analytical Reviuw Lap Keuangan) - 2 laporan (lap.keu pemda)	467.438.600
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- 1 dokumen Rancangan PP APBD TA 2020 - 1 dokumen Rancangan Penjabaran PP APBD TA 2020	71.823.400

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- 1 dokumen (Tinjut LHP BPK) - 1 kasus (kasus kerugian daerah yang terselesaikan pada th berjalan)	36.442.000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen (modul kebijakan akuntansi/sistem akuntansi pemda)	69.308.000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen (SOP Penyusunan Laporan Keuangan)	61.810.200
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang	53.268.000
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 BLUD	28.747.200
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan statistik Pemda	26.484.0000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Keteraksesan Belanja Bunga dan Belanja Tidak Terduga	100%	25.500.000.000
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	500.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	1 Laporan	25.000.000.000
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Persentase Keteraksesan Aplikasi SIPD	100%	250.000.000

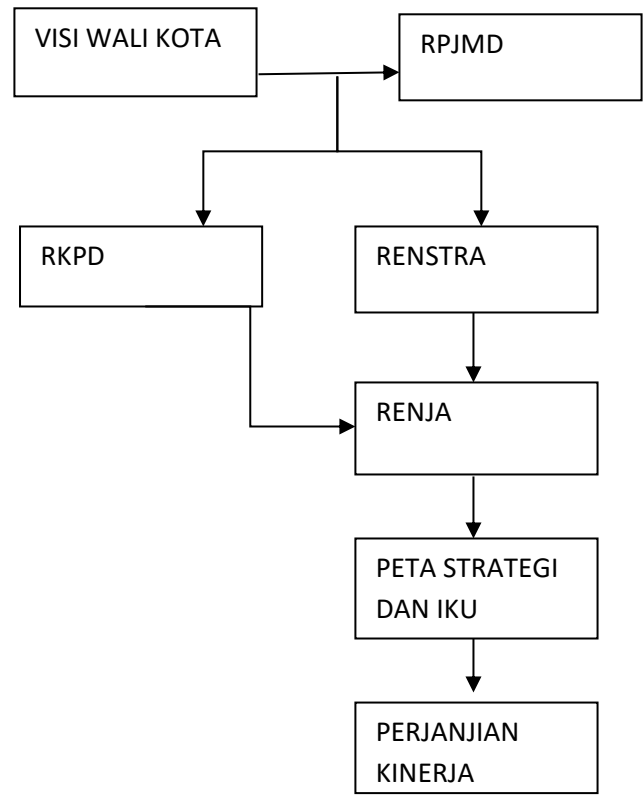
Keuangan Daerah				
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	30 SKPD	250.000.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rasio Utilisasi Aset	70%	1.800.000.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen (SSH)	175.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen (Raperwal kebijakan BMD)	25.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	220.000.000
		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
		Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	15 Laporan	750.000.000
		Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	150.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	25.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan	5 Dokumen	150.000.000

		penghapusan barang milik daerah		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	15.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1
Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2023.

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
	2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100 %
	3. Rasio Utilisasi Aset	72 %

Perjanjian kinerja dibuat setelah RKA dan DPA ditetapkan karena di dalam perjanjian kinerja tercantum anggaran dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan dalam pencapaian target. Rencana Kerja Anggaran (RKA) telah diselaraskan dengan recana kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Tercantum 3 Program 14 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang telah selaras dari rencana kerja, RKA dan DPA pada tahun 2023.

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2023.

Program	Anggaran (Rp)	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.714.558.311	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.267.740.956	100%
Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.851.371.500	100%
Jumlah	28.833.670.767	100%

Selain itu sebagai tindaklanjut dari program dan kegiatan yang disusun, BPKAD Kota Cimahi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Rencana aksi memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan baik dari segi program, kegiatan hingga subkegiatan. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan pertriwulan oleh Kepala BPKAD melalui rapat kerja internal per triwulan. Berikut rencana aksi BPKAD Tahun 2023 :

TABEL 2.7

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV	
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13				14
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BPKAD		60.0	Nilai		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A Nilai			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		2	2	7 dokumen (RKA, RKA-P, DPA, DPPA, Renja, Renja Perubahan, Forum OPD)
								Nilai IKM Perangkat Daerah			80.75	Nilai			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1		2 dokumen (LKIP dan SKM)
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	3	3	3	3	36 orang Pegawai (14 bulan Gaji) (12 bulan tunjangan kinerja objektif lainnya, JKK, JKM, BPJS)
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1				1 dokumen (Laporan Tahunan)
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			1		1 dokumen (semesteran)
													Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	4 laporan stock opname
								Indeks Profesionalitas ASN			50.0	Nilai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Pengelolaan Kepegawaian di BPKAD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	orang		55			55 orang pegawai BPKAD
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan organisasi perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3				3 paket
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3	3	3	3	paket-bulan (12 paket)
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1				1 paket
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3	3	3	12 laporan
															Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	3	3	3	3	12 dokumen
															Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1				1 dokumen
													Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2			2 unit
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang organisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	3	3	12 laporan
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	3	3	3	3	12 bulan
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	4	1	11 unit (R2 9 unit ; R4 3 unit)

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET				KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN		I	II	III	IV	
																Kepmen 050-5889 Th 2021						
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13				14
	1. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu							Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	dokumen		30	30		30 SKPD (2 kegiatan)= 60 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		30	30		30 SKPD (2 kegiatan) = 60 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen	30				30 dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	dokumen				30	30 dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2			2	4 dokumen (2 Perda dan 2 Perwal APBD)
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen		1	1	2	4 dokumen (2 Perda dan 2 Perwal Perubahan APBD)
															Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	1			1	2 laporan
															Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	1	1	1	1	4 dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen		2	2		4 dokumen														
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		40	40		80 orang														
													Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	3	3	3	3	12 dokumen
															Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	120		120		240 Dokumen
															Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen				5	5 dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	3	3	3	3	12 Laporan

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET					KET		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV				
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13					14		
	OPTIMALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	2. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	40	40	40		120 dokumen			
															Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen		1			1 dokumen			
																Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	100		100		200 orang		
																Koordinasi dan Pelaknaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan yang tepat waktu	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	20				20 dokumen
																		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		1	1		2 laporan
																		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen			2		2 Dokumen
																		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen		1			1 dokumen
																		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Dokumen				1	1 dokumen
																		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen				1	1 dokumen
														Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		30			30 orang				
														Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga	15				15 lembaga/ BLUD				
														Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	laporan			1		1 laporan				
													Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Belanja Bunga berserta Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan	1		1		2 laporan				
														Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan				1	1 laporan				

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN		SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET					KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	I	II	III	IV	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	I	II	III	IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN Kepmen 050-5889 Th 2021		I	II	III	IV		
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11	12	13					14
													Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Lingkup Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokumen				1	1 dokumen	
			3.Rasio Utilisasi Aset					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaporan BMD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan BMD	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		1	1		2 Dokumen
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					1	1	2 Dokumen										
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen				1	1	2 dokumen											
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	1			1	1	1	4 laporan										
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan					1	1	2 laporan										
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	5			5	5		15 laporan										
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan				1	1	1	3 laporan										
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan				1	1	1	3 laporan										
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	1			1	1	2	5 dokumen										
				Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	1			1	1	1	4 laporan										
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	30	110		60	200 orang														

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan pertriwulan dievaluasi dan dibahas terkait kendala-kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal serta solusi bersama dari setiap permasalahan.

BPKAD pada tahun 2022 telah menyusun LKIP yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi. Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2022 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 80,80 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
A.	Perencanaan Kinerja	40	32,80	82,00
B.	Pengukuran Kinerja	40	32,00	80,00
C.	Pelaporan Kinerja	20	16,00	80,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,80	80,80

Mengacu kepada hasil review oleh Inspektorat, maka nilai terendah berada pada aspek pelaporan kinerja yaitu hanya 16 dari kemungkinan total 20 atas poin tersebut, Adapun catatan yang perlu diperbaiki atas poin tersebut yaitu menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, oleh sebab itu hal ini menjadi faktor yang BPKAD perbaiki pada Tahun 2023.